



3.1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar terwujud Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

- 1. Merencanakan kinerja dan target kinerja;
- 2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
- 3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan;
- 4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026. Dimana RPJMD terdapat 6 (enam) misi, 7 (tujuh) tujuan, 11 (sebelas) sasaran dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2:
Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKTOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Misi 1	1	1	4	Sangat Tinggi = 4
2.	Misi 2	1	2	4	Sangat Tinggi = 3 Rendah = 1
3.	Misi 3	1	2	4	Sangat Tinggi = 4
	Misi 4	1	3	5	Sangat Tinggi = 2 Tinggi = 1 Rendah = 1 Sangat Rendah = 1
5.	Misi 5	2	2	4	Sangat Tinggi = 3 Sangat Rendah = 1
6.	Misi 6	1	1	4	Sangat Tinggi = 3 Tinggi = 1

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Table 3.3

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	55,00 (CC)	55,65	101,18%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00	75,13	107,32%
		2	Nilai Sakip Daerah	60,00 (B)	60,49 (B)	100,82%
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	65,323 (perlu perbaikan)	71,196 (perlu perbaikan)	108,99%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Rasio Gini	0,341	0,350	102,64%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Indeks Desa Membangun	0,6300 (Berkembang)	0,6670 (Berkembang)	105,87%
5	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,38	1,49	62,61%
		2	Tingkat Kemiskinan	11,34	12,24	107,93%
6	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	68,19	68,35%	100,23%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Indeks Pendidikan	52,55	62,16%	118,28 %
		2	Indeks Kesehatan	68,64	75,09%	109,39
8	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	1	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	9.200.000	9.446.000	102,67%
9	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman	1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	4,61 - 6,14	3,67%	79,61%

		2	PDRB/Kapita	49,83	65,38%	131,21%
10	Meningkatnya Usaha Perikanan	1	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	26,50	27,09%	102,23%
11	Meningkatnya Usaha Pariwisata	1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	4,76	2,67%	56,09%
12	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan	1	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	13,50	1,21%	8,96%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	40,00	Proses	Proses
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Indeks Ketahanan Sosial	0,6900	0,7384	107,01%
15	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan	1	Indeks Kesalehan Sosial	63,00	77,55	123,09%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Angka kriminalitas	130	203	156,15%
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	63,46 (baik)	64,99 %	102,41%
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	52,00	55,56	106,85
		2	Indeks Kualitas Udara	85,39	88,73	103,91
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	42,57	37,29	87,60

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 18 (delapan belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis 1

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah

Tujuan strategis 1 ini merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Seluruh Perangkat Daerah. Hasil pengukuran perwujudan reformasi birokrasi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	33,89 (C)	51,24 (CC)	151,19%	55,00 (CC)	55,65 (CC)	101,18 %
Rata-rata Capaian Kinerja				151,19%	Rata-rata Capaian Kinerja		101,18%

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar lebih baik. Capaian indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2021 adalah 51,24 % dengan predikat “CC” ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik dengan melihat target yang ditentukan pada kondisi awal RPJMD adalah 33,89 dengan predikat “C” , sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebesar 55,65%.

Adapun Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya peningkatan indeks Reformasi Birokrasi adalah :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI selama 5 kali berturut-turut.
2. Inovasi Pelayanan Publik masuk dalam TOP 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021.
3. Melakukan penajaman program Reformasi Birokrasi dalam Road Map 2020-2024 dengan menetapkan *quick wins* terkait pembentukan Mall Pelayanan Publik dan Pelaksanaan SPBE.
4. Telah Menetapkan Agen Perubahan.
5. Telah menyusun kebijakan internal terkait pengawasan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang Benturan Kepentingan, Gratifikasi, *Whistle-Blowing Sistem*, dan Pengaduan Masyarakat.
6. Telah menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dengan melakukan pelantikan pejabat jabatan fungsional pada tanggal 31 Desember 2021.

Dengan terjadinya peningkatan indeks Reformasi Birokrasi tersebut masih terdapat pula hal-hal yang masih perlu diperbaiki, antara lain:

1. Agen Perubahan diharapkan memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan.
2. Diperlukan Sosialisasi dan internalisasi terhadap budaya kerja .
3. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja perangkat daerah.
4. Penyusunan Pemetaan kebijakan yang bersifat menghambat dan tidak harmonis berdasarkan peta keterkaitan kebijakan antara Pusat/Daerah dengan Perangkat Daerah.
5. Penerapan tata kelola SPBE secara maksimal.
6. Penetapan peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap SOP
7. Melaksanakan Assesment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berdasarkan kompetensi.
8. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi manajemen kinerja dan mendorong seluruh perangkat daerah untuk menerapkan dan memanfaatkan aplikasi yang telah dibangun.
9. Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas.
10. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN
11. Melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh seluruh SKPD. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dan hasil pengukuran peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	66,68	83,04	124,53%	70,00	75,13	107,32
2	Nilai Sakip Daerah	58,85 (CC)	60,21 (B)	102,31%	60,00 (B)	60,49 (B)	100,81%
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	n/a	68,8	68,8	65,323 Perlu Perbaikan	71,196 Perlu Perbaikan	108,99
Rata-rata Capaian Kinerja				98,55%	Rata-rata Capaian Kinerja		105,71%

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2022 sebesar 75,13% jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2021 di akhir RPJMD yakni 76,22, maka terjadi penurunan sebesar 1.09 hal ini disebabkan belum optimalnya standar pelayanan minimal di lingkup pemerintah kabupaten kepulauan selayar.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat adalah :

1. Perlunya dilakukan pendampingan kepada beberapa Perangkat Daerah Pelaksana Layanan.
2. Peran aktif dalam hal informasi terhadap Perangkat Daerah terkait batas waktu pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat.

3. Perangkat Daerah telah mengikuti Bimbingan Teknis dan Survey Serentak yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi terkait kebijakan SKM.
4. Perbaikan pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas waktu pelayanan melalui aplikasi dan peningkatan inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan/ ide-ide kreatif yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

2. Nilai Sakip Daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melihat hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2021 sebesar 60,21% dengan predikat “B” terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 58,02 dengan predikat CC. Sedangkan Tahun 2022 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) menunjukkan nilai 60,49 dengan predikat “B”.

Tabel 3.1.2
Perkembangan capaian Nilai SAKIP Kab. Kep. Selayar
Tahun 2020 - 2022

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021 (akhir RPJMD)	Tahun2022 (awal RPJMD)
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	CC 58,02	B 60,21	B 60,49

Berdasarkan tabel perkembangan capaian nilai SAKIP tersebut, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan demi meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adapun upaya yang akan dilakukan, antara lain :

1. Memperbaiki penyusunan pohon kinerja dengan mengacu pada Permenpan RB No 89 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan.
3. Menyempurnakan IKU pada sebagian Perangkat Daerah dengan menambahkan formulasi perhitungan dan sumber data yang akan digunakan dalam menghitung indikator kinerja dan memastikan formulasi

perhitungan yang digunakan telah sesuai untuk menggambarkan indikator kinerja.

4. Mengoptimalkan aplikasi pengukuran kinerja secara organisasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara organisasi maupun unit kerja.
5. Melakukan monitoring rencana aksi secara berkala
6. Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang berpedoman pada PermenPANRB No.88 Tahun 2021.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain:

1. Internal Birokrasi:
 - a. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD dengan kegiatan-kegiatan yang *project error*;
 - b. Masih rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan;
 - c. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
2. Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah:
 - a. Belum mampu menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan yang baik, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
 - b. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Adapun alternatif strategi yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur perencana, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang perencanaan;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
3. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerja sama dengan SKPD atau pihak yang terkait;

4. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerja sama.
5. Diperlukan adanya koordinasi yang menyeluruh agar pada tahun mendatang target dapat dicapai.

3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2022 sebesar 71,196 jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yakni 68,8 yang mana realisasi ini masih perlu perbaikan, namun jika dilihat dari realisasi capaian maka terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 2,396. Hal ini disebabkan adanya peranan penting dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dari sektor pengelolaan dan pelaporan keuangannya juga dari Inspektorat Daerah dari sektor pengawasannya.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 yang telah disusun dan diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 17 Maret 2023 oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan pemeriksaan atau diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang nantinya akan diberikan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun Faktor pendukung keberhasilan peningkatan pencapaian terhadap indikator tersebut adalah :

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Adanya upaya seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah masing-masing.
4. Dari sektor pengawasan, inspektorat berperan penting dalam hal pemeriksaan laporan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor yang menghambat peningkatan capaian terhadap indikator tersebut disebabkan masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun solusi yang dilakukan di tahun akan datang adalah :

- 1. Akan menindaklanjuti kelemahan pada sistem pengendalian intern
- 2. Meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Tujuan Strategis2

Meningkatkan KualitasPembangunanPerdesaan

Tujuan strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **“Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**. Tujuan ini didukung secara terpadu oleh Dinas PUTR, Dinas PMD, Distan KP, DPK, DLH, BPBD, Disdikpora dan Dinkes. Untuk mengukur tujuan kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran pada Tahun 2022. Hasil pengukuran peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Gini	0,357	0,354	99,15%	0,343	0,350	102,64%
Rata-rata Capaian Kinerja				99,15%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,64%

Rasio Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada pada ketimpangan tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kepulauan selayar pada tahun 2022 yang diukur oleh Rasio Gini adalah 0,350, menurun 0,04 poin dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar, 0,354. Terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran penduduk di

Kepulauan Selayar dari Tahun 2021 sebesar 0,354 menjadi 0,350 pada tahun 2022.

Perhitungan indeks Gini pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih melalui pendekatan pengeluaran, hal ini disebabkan masih terbatasnya informasi yang didapat disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak ingin mempublikasikan penghasilannya.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “**Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan**”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **105,87%** dengan kategori predikat**Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Desa Membangun	0,6061 (berkembang)	0,6201	102,30%	0,6300 (Berkembang)	0,6670	105,87%
Rata-rata Capaian Kinerja				102,30%	Rata-rata Capaian Kinerja		105,87%

Realisasi capaian Indeks Desa Membangun pada Tahun 2022 sebesar 0,6670% terjadi peningkatan bila dilihat dari target yang ditentukan sebesar 0,6300% dengan sebutan “berkembang”, jika dibandingkan dengan target capaian pada Tahun 2021, Indeks Desa Membangun sebesar 0,6201% dengan sebutan “berkembang”.

Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun melibatkan beberapa Perangkat Daerah, Adapun upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian peningkatan Indeks Desa Membangun adalah :

1. Identifikasi IDM yang akan menaikkan indeks
2. Memetakan hasil identifikasi yang akan dinaikkan indeksnya agar rekomendasi dapat dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan lokal desa
3. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait setelah hasil pemetaan didapatkan dengan tujuan agar Perangkat daerah dapat mengintervensi rekomendasi IDM tersebut.
4. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Multi Stakeholder (Tenaga Ahli, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa) agar pemetaan rekomendasi IDM dapat dimaksimalkan dalam bentuk kegiatan di Perangkat Daerah dan Desa.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar**85,27%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kemiskinan	12,48	12,45	99,76	11,34	12,24	107,93%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,44	2,81	115,16	2,38	1,49	62,61%
Rata-rata Capaian Kinerja				107,46%	Rata-rata Capaian Kinerja		85,27

1. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data statistik, Presentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada bulan Maret 2022 sebesar 12,24%, terjadi penurunan sebesar 0,21% poin terhadap maret 2021 yang sebesar 12,45% dan turun 0,24 % poin terhadap maret 2020 yakni sebesar 12,48%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada maret 2022 sebesar 16,74 ribu jiwa, menurun 190 jiwa terhadap maret 2021 yakni 16,93 ribu jiwa dan menurun 300 jiwa terhadap maret 2020 yakni sebesar 17,04 ribu jiwa.

Pada Maret 2022, garis kemiskinan sebesar Rp. 430.976,-/kapita/bulan, jika dibandingkan dengan maret 2021, garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.244,-/kapita/bulan. Pada Periode maret 2018 sampai maret 2022, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan terus meningkat sebesar Rp. 82.368,-/kapita/bulan pada maret 2018 menjadi Rp. 430.976,-/kapita/bulan pada maret 2022.

Jika dilihat dari target awal RPJMD maka persentase penduduk miskin mengalami kenaikan dengan target awal sebesar 11,34. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah :

1. Setiap tahun dilakukan update data keluarga miskin agar penanganan kemiskinan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
2. Melalui Dinas Sosial dilakukan beberapa kegiatan antara lain :
 - Pemberian santunan hidup terhadap lanjut usia non potensial/ jompo terlantar, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu.
 - Program nasional berupa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional
 - Program keluarga Harapan (PKH)
 - Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT Bantuan Pangan Non Tunai
 - Bantuan Langsung Tunai - Bahan Bakar Mintak (BLT - BBM)
3. Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan bantuan penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang sampai dengan tahun 2022 sudah tertangani sebanyak 3.095 unit.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memberikan bantuan Peralatan yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa bantuan Pengadaan Depot Air Minum sebanyak 2 unit, Pengadaan AMDK sebanyak 1 unit, Pengadaan Masak memasak sebanyak 55 unit, Pengadaan mesin jahit sebanyak 35 unit,

Pengadaan parut kelapa sebanyak 36 unit, Pengadaan Alat Pertukangan sebanyak 70 unit dan terakhir Pengadaan Perbengkelan sebanyak 73 unit.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, biasanya hal tersebut didapatkan pada masyarakat khususnya lulusan baru perguruan tinggi.

Realisasi indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 adalah sebesar 1,49 persen terjadi penurunan sebesar 1,32 persen jika dibandingkan realisasi pada tahun 2021 yang sebesar 2,81 persen, hal ini menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah lebih baik dari tahun sebelumnya.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka adalah :

1. Ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan
2. Minimnya pengalaman dari pencari kerja
3. Perubahan Industri
4. Rendahnya Permintaan Pegawai disebabkan revolusi industri
5. Kondisi ekonomi yang terjadi, dan
6. Isu diskriminasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi pengangguran terbuka diantaranya sebagai berikut :

1. Menambah jumlah lowongan pekerjaan yang mana dapat dilihat dengan berdirinya supermaket (Alfamidi/indomaret) di kota benteng dan beberapa kecamatan daratan di kepulauan selayar.
2. Menambah keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas PMPTSPK memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pelatihan di BLK seperti pelatihan keterampilan menjahit, pertukangan, perbengkelan, dll.
3. Membuka lapangan usaha sendiri, pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian izin usaha.
4. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM memberikan bantuan dana melalui Koperasi dalam membangun usaha mandiri dengan angsuran yang lebih ringan.

Tujuan Strategis 3

Meningkatkan fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia

Tujuan strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”**. Untuk mengukur tujuan ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator tujuan dengan capaian kinerja tujuan pada Tahun 2022 adalah sebesar **100,23%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hasil pengukuran peningkatan fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 3

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	67,38	67,76	100,56	68,19	68,35	100,23
Rata-rata Capaian Kinerja				100,56%	Rata-rata Capaian Kinerja		100,23%

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup sebagai ukuran kualitas hidup , IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 mencapai 68,35 naik 0,59 poin atau 0,87 % di bandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 67,76 selama 2021 sampai 2022. IPM Kabupaten Kepulauan Selayar rata-rata tumbuh sebesar 0,84 % setiap tahunnya.

Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini sejalan dengan kondisi tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 kondisi normal yang baru pasca pandemi covid 19 menyebabkan peningkatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran perkapita yang disesuaikan telah merangkak naik 4,26 % dibanding tahun 2021.

Pada dimensi pendidikan, pada tahun 2022 penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau dapat menjalani pendidikan formal selama 12,67 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma 1. Angka ini meningkat 0,08 % dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 12,66 tahun. Sementara, rata-rata lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,12 % dari 8,08 tahun menjadi 8,09 tahun pada tahun 2022.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bagi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,81 tahun atau lebih lama 0,29 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk mengukur sasaran keempat ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **113,84%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan	50,92%	50,92%	100%	52,55%	62,16%	118,29%
2	Indeks Kesehatan	68,46%	68,52%	100,09%	68,64%	75,09%	109,39%
Rata-rata Capaian Kinerja				100,05 %	Rata-rata Capaian Kinerja		113,84%

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM.

Berdasarkan data statistik, Indeks Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 sebesar 80,75% terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan indeks pendidikan tahun 2021 yang hanya sebesar 50,92%.

Beberapa upaya yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pendidikan adalah :

1. Memberikan motivasi dan dorongan bagi orangtua dan siswa akan pentingnya pendidikan dasar 9 tahun.
2. Dari segi tenaga pengajar (guru) di tunjang dengan penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
3. Pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga siswa sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan hidup lebih tenang tanpa ada gangguan.
4. Dari segi kesehatan diperlukan partisipasi tenaga medis dengan mengunjungi sekolah-sekolah dapat memberikan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa.

2. Indeks Kesehatan

Realisasi indikator kinerja terhadap indeks kesehatan tahun 2022 sebesar 75,09%, meningkat 6,28% dari target awal yang ditentukan pada RPJMD, jika dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 68,52%. Jika Indeks Kesehatan Masyarakat meningkat beberapa persen dari target yang telah ditentukan berarti derajat kesehatan di daerah tersebut meningkat pesat dari

tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar akan pola hidup sehat meningkat drastis dari tahun sebelumnya.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal peningkatan capaian dan realisasi kegiatan di bidang kesehatan antara lain:

- 1. Menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas;
- 2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang upaya pemeliharaan kesehatan;
- 3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang maksimal.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, . Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **102,67%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi** Hasil pengukuran peningkatan daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengeluaran perkapita yang disetarakan	8.970.000	9.060.000	101,00	9.200.000	9.446.000	102,67
Rata-rata Capaian Kinerja				101,00%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,67%

1. Pengeluaran Perkapita yang disetarakan

Pada tahun 2022 pengeluaran perkapita yang disetarakan mencapai 9.446.000 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 386.000 atau 1,042%. Dengan rata-rata capaian pada tahun 2022 yakni 102,67 %. Hal ini berarti pengeluaran rata-rata rumah tangga yang ada di Kepulauan Selayar meningkat.

Pengeluaran Rumah tangga memberi sumbangsi besar dalam peningkatan pengeluaran perkapita. Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Tujuan Strategis 4

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman

Tujuan strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2022 yaitu **“Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”**. Untuk mengukur tujuan keempat ini terdapat 2 (dua) indikator tujuan sasaran yang didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur tujuan keempat ini terdapat 2 (dua) indikator tujuandengan capaian kinerja tujuanpada Tahun 2022 adalah sebesar **88,79%**dengan kategori predikat **Tinggi**.Hasil pengukuran tujuan optimalisasi pemanfaatan potensi kemaritiman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 4

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	-1,78%	4,02%	2,25 %	4,61%-6,14%	3,67%	69,69
2	PDRB /kapita	46,71 Juta	49,54 juta	106,05 %	49,83 Juta	53,76 juta	107,88%
Rata-rata Capaian Kinerja				100,63%	Rata-rata Capaian Kinerja		88,79%

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 sebesar 3,67 % mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 4,02%. Pertumbuhan terjadi hampir pada seluruh lapangan usaha kecuali lapangan usaha Administrasi Pemerintahan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,53%. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel. Pertumbuhan kedua dicapai oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,67% diikuti oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,50%.

Tabel 3.1.2
Perkembangan capaian Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kep. Selayar
Tahun 2020 - 2022

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun2022
Pertumbuhan Ekonomi	-1,78%	4,02%	3,67%

Selain lapangan usaha yang disebutkan di atas, terdapat enam lapangan usaha yang juga tumbuh di atas 4 persen diantaranya yaitu: Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,86 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 7,66 persen; Industri Pengolahan sebesar 7,23 persen; Jasa Pendidikan sebesar 5,19 persen; Konstruksi sebesar 4,56 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,11 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi PDRB terbesar hanya tumbuh sebesar 2,62 persen.

2. PDRB/kapita

Pendapatan perkapita penduduk (income perkapita) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian antara pendapatan Daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin besar juga

kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2022 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022Income perkapita penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 53,76 juta,- sedangkan Tahun 2021 sebesar 49,54 juta,-dan Tahun 2020 sebesar Rp. 246,73 juta,-.Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan selayar setiap tahunnya. Pada Tahun 2022Income perkapita penduduk mengalami peningkatan sebesar Rp.4,22 juta,- dari Tahun 2021. Sedangkan pada Tahun 2021Income perkapita pendudukjuga mengalami kenaikan sebesar Rp.2,81 juta,- dari Tahun 2020. Income perkapita penduduk sering diring digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah; semakin besar Income perkapita penduduknya maka semakin makmur daerah tersebut. Adapun pencapaian indikator tersebut di dukung oleh:

1. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan perkapita melalui berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain senantiasa meningkatkan koordinasi baik di tingkat kecamatan, sidak ke pasar, toko dan gudang sembako yang ada, kemudian peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM, gas LPG.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang mana penunjang utamanya adalah konsumsi rumah tangga disamping konsumsi makanan dan minuman, kesehatan, transportasi, komunikasi dll.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Usaha Perikanan

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa OPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **102,23%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan usaha perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	25,96%	25,45%	98,04%	26,50%	27,09%	102,23%
Rata-rata Capaian Kinerja				98,04%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,23%

Realisasi Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2022 sebesar 27,09% terjadi peningkatan sebesar 1,64% jika dibandingkan realisasi tahun 2021 yakni 25,45%.

Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan realisasi tersebut adalah :

1. Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan melihat volume produksi perikanan tangkap sebesar 97,15% dengan kategori sangat tinggi.
2. Meningkatnya produk olahan hasil perikanan dengan persentase capaian sebesar 129,59% dengan kategori sangat tinggi.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan realisasi capaian di tahun depan yaitu :

1. Meningkatkan produktifitas pelaku usaha perikanan tangkap pada usaha skala kecil dan mikro.
2. Meningkatkan keberdayaan pelaku usaha perikanan tangkap.
3. Perlunya pengawasan perairan terhadap kemungkinan terjadinya transaksi ikan di atas kapal (transshipment) dan memaksimalkan ketersediaan sarana dan fasilitas pendaratan sentra dan subsentra pendaratan.
4. Meningkatkan daya saing produk olahan hasil perikanan
5. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha pada aspek pengolahan dan pasar, dan;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung produksi pengolahan.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Usaha Pariwisata

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa OPD yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **56,09%** dengan kategori predikat **Rendah**. Hasil pengukuran Peningkatan usaha pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi PAD sektor Pariwisata terhadap PAD	3,93%	4,45	113,23%	4,76%	2,67%	56,09%
Rata-rata Capaian Kinerja				113,23%	Rata-rata Capaian Kinerja		56,09%

Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD

Realisasi capaian terhadap presentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2022 sebesar 2,67% terjadi penurunan capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 4,45%. Realisasi capaian tersebut masih jauh dari target yang ditentukan.

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah :

1. Belum maksimalnya pengelolaan retribusi tempat rekreasi tamamelong
2. Belum adanya bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bumdes Bontomarannu terkait pengelolaan Puncak tanadoang.

3. Kurangnya kemauan, kesungguhan dan pengetahuan dalam perencanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemilihan prioritas kegiatan dan juga dukungan anggaran.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya penuh dalam meningkatkan PAD melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adapun upaya yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama antara para pelaku wisata
2. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya.
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan
4. Pengembangan pariwisata pada masyarakat khususnya yang berada dekat dengan lokasi tempat rekreasi.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **8,96%** dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan usaha industri, transportasi dan perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	12,61%	12,69%	100,63%	13,50%	1,21%	8,96%
Rata-rata Capaian Kinerja				100,63%%	Rata-rata Capaian Kinerja		8,96%

Realisasi terhadap indikator presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2022 sebesar 1,21 persen, Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yakni 12,69% maka terjadi penurunan realisasi yang sangat drastis bila dilihat dari apa yang ditarget yakni sebesar 13,50%.

Capaian kinerja Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan transportasi dan perdagangan terhadap PDRB diperoleh dari perbandingan antara jumlah PAD sektor transportasi dengan jumlah PAD kabupaten. Data PAD sektor transportasi diperoleh dari besarnya realisasi capaian PAD Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel
Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A.	Retribusi Jasa Umum			
1	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	177.969.000	200.024.000	112,39
B	Retribusi Jasa Usaha			
1	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	6.200.000	11.600.000	187,10
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan	70.344.000	5.377.000	7,64

	Penumpang dan Bus Umum			
3	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	23.000.000	22.834.000	99,28
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	629.069.600	590.171.020	93,82
	JUMLAH	906.582.600	830.006.020	91,55

Faktor penyebab sehingga tidak tercapainya target yang telah ditetapkan karena sebagian besar prasarana penyumbang PAD sektor transportasi diambil pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi.

Adapun solusi yang dilakukan dari Dinas perhubungan yaitu dengan mengupayakan adanya tambahan sumber PAD melalui sektor transportasi.

Faktor penyebab sehingga tidak tercapainya target dari sektor perdagangan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Belum tersebarnya investasi pada master plan pengemban investasi di kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Sektor /lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan.
3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara rutin
4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian LKPM yang bersifat memaksa.

Beberapa solusi dari sektor perdagangan melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Penyusunan dokumen investment Project Ready to Offer sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) sehingga layak untuk dipasarkan kepada investor terutama investor dari Luar Negeri.

2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM, Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan.
3. Lebih meningkatkan koordinasi pihak yang terlibat dalam penyiapan investasi terutama dengan instansi seperti Pajak, PLN dan regulasi yang mendorong untuk menyapaikn LKPM.

Tujuan Strategis 5

Meningkatkan Aktualisasi nilai budaya

Tujuan strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil pengukuran peningkatan aktualisasi nilai budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	n/a	48,36	48,36%	40	proses	proses
Rata-rata Capaian Kinerja				48,36%	Rata-rata Capaian Kinerja		proses

Realisasi terhadap indeks pembangunan kebudayaan pada tahun 2021 sebesar 48,36% sedangkan tahun 2022 masih tahap proses perhitungan oleh Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten kepulauan selayar.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur tujuan kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **117,20%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Sosial	0,6817	0,6993	102,58	0,6900	0,7384	117,20
Rata-rata Capaian Kinerja				102,58 %	Rata-rata Capaian Kinerja		117,20 %

Pencapaian indeks ketahanan sosial pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,62 % dibanding tahun 2021 yakni 117,20 %. Kenaikan indeks ketahanan sosial dipengaruhi oleh beberapa dimensi diantaranya dimensi modal sosial, dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial yaitu :

1. Toleransi tinggi terhadap suku, ras dan agama.
2. Aman dalam beribadah.
3. Terpenuhinya kebutuhan dari sandang, pangan dan papan.
4. Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, PKM ataupun Pustu.
5. Keinginan masyarakat untuk berobat di layanan kesehatan seperti Rumah Sakit, PKM maupun Pustu.
6. Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk berobat dengan layanan jaminan kesehatan seperti KIS, BPJS Kesehatan.
7. Pemerintah menyediakan sekolah baik tingkat dasar dan menengah, mulai

- dari kecamatan daratan yang dapat dijangkau hingga kecamatan kepulauan yang sulit dijangkau.
- Pemerintah memudahkan perizinan pembukaan lembaga pendidikan non formal, seperti pusat bimbingan belajar, les bahasa Inggris dan lainnya.

Tujuan Strategis 6

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan keagamaan

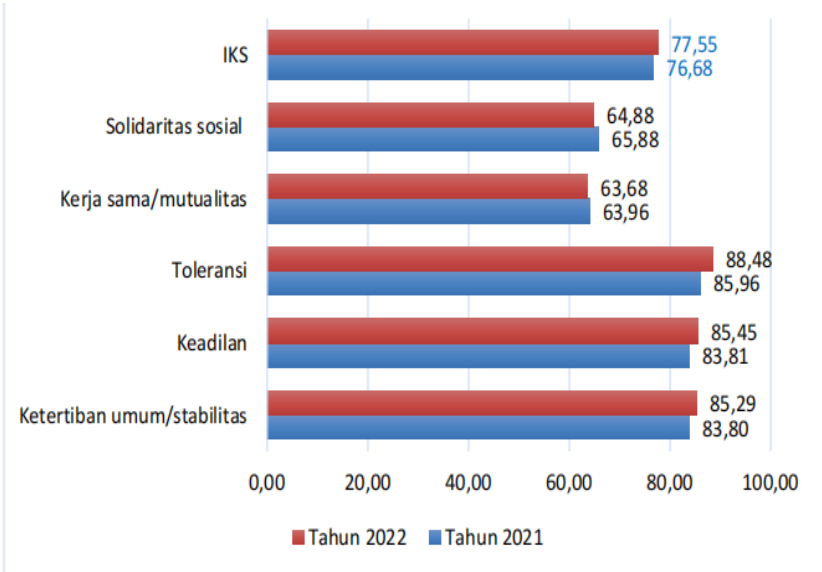
Tujuan strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik. Untuk mengukur tujuan keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **123,09%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kesalehan Sosial	n/a	76,68	76,68%	63,00	77,55	123,09
Rata-rata Capaian Kinerja				76,68%	Rata-rata Capaian Kinerja		123,09

Indeks Kesalehan Sosial

Hasil perhitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2022 sebesar 77,55 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,87 poin.



Sumber data : Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

Terdapat tiga dimensi IKS tahun 2022 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Indeks dimensi Toleransi tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021, yaitu dari 85,96 naik menjadi 88,48. Sementara indeks dimensi Keadilan juga mengalami kenaikan dari 83, 81 tahun 2021 menjadi 85,45 pada tahun 2022. Dimensi ketertiban umum/stabilitas tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2021, yaitu dari 83,80 pada tahun 2021 menjadi 85,29 pada tahun 2022. Sementara itu dua dimensi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Indeks dimensi Solidaritas Sosial tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021, yaitu dari 65,88 turun menjadi 64,88. Sementara indeks dimensi kerja sama/mutualitas juga mengalami penurunan dari 63,96 tahun 2021 menjadi sebesar 63,6 pada tahun 2022.

Kenaikan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 hanya sebesar 0,87 poin, menunjukkan bahwa program-program terkait sosial keagamaan dan kemasyarakatan belum berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat khususnya dalam dimensi solidaritas sosial dan kerja sama/mutualitas. Hal ini yang dapat menjadi perhatian khusus pada masa mendatang untuk meningkatkan nilai dimensi Solidaritas Sosial dalam hal memberi pada sesama, peduli dengan sesama serta dimensi Kerja sama dalam hal kontribusi baik tenaga dan pikiran. Masih rendahnya dimensi Solidaritas Sosial dan Kerja sama dapat dipahami karena semua mengalami dampak pandemi, sehingga kondisi masing-masing anggota masyarakat terbatas dan fokus pada pemulihan masing-masing.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. Untuk mengukur sasaran kesepuluh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **156,15%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kriminalitas	146 kasus	139kasus	0,95%	130 kasus	203 kasus	156,15%
Rata-rata Capaian Kinerja				0,95%	Rata-rata Capaian Kinerja		156,15%

Realisasi capaian pada tahun 2021 terhadap kasus kriminalitas adalah sebanyak 139 kasus, sedangkan pada tahun 2022 jumlah kasus kriminalitas meningkat sebanyak 203 kasus, berdasarkan jumlah tersebut perilaku kriminalitas yang paling banyak adalah pencurian biasa. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, selain itu pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku belum optimal sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar hukum, baik pelanggaran berat maupun ringan.

Upaya yang dilakukan agar tindak kriminalitas berkurang/diminimalisir yaitu :

1. Melakukan trantibum secara rutin
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan trantibum
3. Menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan poskamling/ronda

Tabel 3.13.1

Data Angka Kriminalitas Tahun 2021 - 2022

No T u j u a n S t r a t e g i s 7 M e n i n g k a t a	JENIS KEJAHATAN	TAHUN	
		2021	2022
1	Narkoba	12	14
2	Pengrusakan	3	9
3	Penyerobotan Tanah	4	7
4	Senjata Tajam	1	1
5	Penodongan	0	0
6	Minuman Keras	1	1
7	Perkelahian	0	0
8	Pemerasan	2	0
9	Penculikan	0	0
10	Curanmor	0	7
11	Pencurian Ternak	0	1
12	Pencurian Berat	0	0
13	Pencurian Biasa	41	61
14	Penganiayaan	38	56
15	Penipuan	16	20
16	Pembakaran	1	1
17	Pengeroyokan	3	7
18	Kesusilaan	3	0
19	Pencabulan	3	8
20	Perjudian	6	5
21	Pemeriksaan	4	1
22	Penyalahgunaan BBM	1	4
23	Percobaan Pemeriksaan	0	0
24	Senpi ilegal/rakitan	0	0
25	Korupsi	0	0
	JUMLAH	139	203

TUJUAN STRATEGIS 7

Meningkatkan Pelestarian lingkungan hidup

Tujuan strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk mengukur tujuan ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **156,71%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.2
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,28 (baik)	62,27	83,83	63,46 Cukup baik	99,45	156,71
Rata-rata Capaian Kinerja				83,83%	Rata-rata Capaian Kinerja		156,71%

Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2022 mencapai 99,45 mengalami peningkatan 37,18 dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021 sebesar 62,27. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di kabupaten kepulauan selayar tergolong baik.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup daerah antara lain :

1. Diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti patroli air.
2. Melakukan koordinasi antar pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
3. Peningkatan peran dunia usaha untuk melaksanakan pengelolaan air limbah.
4. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL dan USK.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kajian lingkungan hidup strategis.

- 6. Meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3.
- 7. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 11

Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2022 adalah sebesar **99,45%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No.	Indikator	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Air	50,00	50,00	99,01	52,00	55,56	106,85
2	Indeks Kualitas Udara	88,80	87,16	98,15	85,39	88.73	103,91
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	89,12	37,29	41,84	42,57	37,29	87,60
Rata-rata Capaian Kinerja				79,67%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,45%

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air pada Tahun 2022 berada pada angka 55,56 dari target yang direncanakan sebesar 52,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 106,85% sehingga mencapai target yang diperjanjikan, jika dibandingkan realisasi pada tahun 2021 yakni 50 maka terjadi peningkatan pada tahun 2022.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indeks kualitas air pada tahun berikutnya maka dilakukan upaya sebagai berikut :

- 1. Diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan

mutu air seperti patroli sungai.

2. Melakukan koordinasi antar pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
3. Peningkatan peran dunia usaha untuk melaksanakan pengelolaan air limbah sesuai ketentuan.
4. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL dan USK.

Faktor penyebab keberhasilan capaian Indeks Kualitas Air adalah :

1. Melakukan diagnosis yang benar dengan memperhatikan penyebab dan sumber pencemaran yang ada.
2. Melakukan pengelolaan kualitas air sebagai upaya pengendalian pencemaran air dengan memelihara fungsi sehingga kualitas air memenuhi mutu baku.

2. Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2022 sebesar 88,73 persen, terjadi peningkatan sebesar 1,57 % dibandingkan tahun 2021 yakni 87,16%, hal ini menunjukkan indeks kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong baik.

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemaran utama yaitu oksidan /ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun saat ini perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO₂ dan SO₂.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan di tahun akan datang yaitu :

1. Meningkatkan strategi pengelolaan persampahan, dan
2. Meningkatkan pendidikan dan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat untuk mempertahankan kualitas udara.

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran kualitas udara adalah :

1. Kawasan Industri (PLTD Tangkak) yang menggunakan diesel dengan solar sebagai bahan bakar sehingga kandungan SO₂ besar dan lebih tinggi dari NO₂.
2. Kawasan perkantoran, kandungan SO₂ lebih tinggi dari NO₂ dikarenakan tepat disamping kawasan tersebut merupakan akses keluar masuk truk ke pertambangan dengan aktivitas pengangkutan yang tinggi, juga ruas jalan di

depan kawasan perkantoran juga merupakan jalur untuk kendaraan truk dan kendaraan besar lainnya.

3. Kawasan permukiman khususnya jalan sudirman, kandungan SO₂ hampir sama tinggi dengan NO₂. Hal ini dapat terjadi karena merupakan titik ramai lalu lintas dengan 5 arah lalu lintas, tanpa lampu merah dan merupakan batas kendaraan besar seperti truk untuk tidak masuk ke kota sehingga hal ini membuat lalu lintas padat sehingga terjadi peningkatan emisi gas buang kendaraan.
4. Kandungan SO₂ besar dan lebih tinggi dari NO₂ pada kawasan transportasi khususnya terminal benteng, hal ini dikarenakan angkutan penumpang yang menggunakan solar lebih banyak dibandingkan dengan bensin dan umur kendaraan banyak di atas lima tahun.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Realisasi indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2022 sebesar 37,29 terjadi kesamaan realisasi atau stabil jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan indeks tutupan lahan kabupaten kepulauan selayar masih tergolong kurang baik. Untuk mencapai target pencapaian tersebut maka diperlukan inventarisasi data ruang terbuka hijau (RTH) secara menyeluruh sebagai salah satu indikator yang disyaratkan dalam IKL.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan IKL dengan meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi melakukan kegiatan penghijauan yang dilaksanakan di 10 Kecamatan, yang mana pelaksanaannya dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya multi purpose treespecies (MPTS).

1.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 25 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada rincian realisasi anggaran berikut ini:

Tabel 3.31
Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	9.100.900	9.100.900	100%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	19.571.000	19.565.000	99,97%
		Nilai Sakip Daerah	10.000.000	10.000.000	100%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	144.883.789.132	142.888.638.209	98,62%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	8.197.746.157	8.109.428.566	98,92%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	1.902.836.000	1.839.240.260	96,66%
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	740.700.069	740.437.249	99,96%
		Tingkat Kemiskinan	1.047.500.000	1.032.825.600	98,59%
6	Meningkatkan fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1.127.889.000	1.054.989.048	93,54%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	3.252.287.725	2.993.929.717	92,06%
		Indeks Kesehatan	166.175.306.977	96.976.660.801	58,36%
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	873.795.000	869.909.200	99,55%
9	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1.962.953.535	1.928.283.291	98,23%
		PDRB/Kapita	154.662.000	148.752.366	96,18%
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	4.818.036.095	4.437.109.416	92,09%
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	3.292.428.400	2.994.589.030	90,95%
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	3.984.917.100	3.632.518.938	91,16%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	-
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan sosial	203.911.100	196.871.398	96,55%
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	203.911.100	196.871.398	96,55%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	532.368.100	527.929.250	99,17%
17	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	7.980.726.400	7.883.584.562	98,78%
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	703.513.200	686.979.490	97,72%
		Indeks Kualitas Udara	58.153.200	51.739.800	97,67%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	2.917.50.400	2.874.117.156	96,75%

1.4. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber daya

Tingkat efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, sedangkan efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang maksimum. Berikut ini perbandingan antara tingkat efektifitas dan efisiensi sumber daya terhadap perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) sasaran.

Tabel 3.32
Tingkat Efektivitas sumber daya Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	100%	101,18%	1,18%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,97%	107,32%	7,35%
		Nilai Sakip Daerah	100%	100,82%	0,82%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	98,62%	108,99%	10,37%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	98,92%	102,64%	3,72%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	96,66%	105,87%	9,21%
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	99,96%	62,61%	-37,35%
		Tingkat Kemiskinan	98,59%	107,93%	9,34%
6	Meningkatkan fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	93,54%	100,23%	6,69%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	92,06%	118,28%	26,22%
		Indeks Kesehatan	58,36%	109,39%	51,03%
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	99,55%	102,67%	3,12%
9	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	98,23%	79,61%	18,62%
		PDRB/Kapita	96,18%	131,21%	35,03%
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	92,09%	102,23	10,14%
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	90,95%	56,09%	-34,86%
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	91,16%	8,96%	-82,2%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	-	-	-
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan sosial	96,55%	107,01	10,46%
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	96,55%	123,09%	26,54%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	99,17%	156,15%	56,98%
17	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	98,78%	156,71%	57,93%
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	97,72%	106,85%	9,13%
		Indeks Kualitas Udara	97,67%	103,91%	6,24%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	96,75%	87,60%	-9,15%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 25 (dua puluh lima) sasaran dan yang diperjanjikan dalam RPJMD, terdapat 20 (dua puluh) sasaran dengan tingkat efisiensi cukup baik dengan rata-rata capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 18,006%. Selain itu terdapat 4 sasaran dengan tingkat efisinsi kurang baik dan 1 sasaran masih sementara dalam proses. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan hubungan antara sasaran, indikator kinerja dengan program yang mendukung pencapaian indikator tersebut serta OPD penanggung jawab.

Tabel 3.3
Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU dan Program

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah,
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Sekretariat Daerah,
		Nilai Sakip Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Sekretariat Daerah,
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program pengelolaan keuangan daerah 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 4. Program penelitian dan pengembangan daerah	Inspektorat, BPKPD, Bappelitbangda
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	1. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 2. Program pembinaan perpustakaan 3. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 4. Program pemberdayaan masyarakat bidang	Distan KP, DPK, Disdikpora, Dinkes

			kesehatan	
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	1. Program Penataan Desa 2. Program peningkatan kerjasama desa 3. Program Administrasi Pemerintahan 4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemerintahan dan Desa
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitasi Perekonomian Perdesaan	Tingkat Kemiskinan	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Program penempatan tenaga kerja	Dinas PMPTSPTK
6	Meningkatnya Fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 2. Program penelitian dan pengembangan daerah	Bappelitbangda
7	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidikan dan tenaga kependidikan	Disdikpora
		Indeks Kesehatan	1. Program pemenuhan upaya-upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia Kesehatan 3. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinkes
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita yang disetarakan	1. Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota 2. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam /unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah	Disperindag KUKM

			kabupaten/kota 3. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	
9	Mengoptimalkan pemanfaatn potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Program pelaksanaan kebijakan perekonomian 2. Program pelaksanaan administrasi pembangunan 3. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri	Setda
		PDRB/kapita	Program promosi penanaman modal	Dinas PMPTSPTK
10	Meningkatnya usaha perikanan	Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	1. Program pengelolaan perikanan tangkap 2. Program pengelolaan perikanan budidaya 3. Program pengelolaan pembudidayaan ikan	Dinas Perikanan
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi dan perdagangan	Persentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 2. Program pengelolaan pelayaran 3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 4. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas Perhubungan Dinas PMPTSPTK
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program pengembangan kebudayaan	Disparbud

14	Meningkatnya usaha pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesbangpol
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Badan Kesbangpol
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka kriminalitas	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP dan damkar
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 3. Program penanganan pengaduan kegiatan Lingkungan Hidup 4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) 6. Program pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (Mha), kearifan lokal dan hak Mha yang terkait dengan PPLH 8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9. Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat 10. Program Pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
18	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air		
		Indeks Kualitas Udara		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		